



## Efektivitas Program Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah dalam Menyambut Pemilu Serentak 2024

Fela Uswatun Khasanah<sup>1</sup>, Annindya Putri Saraswati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Semarang

### Abstract

Received: 01 Juni 2024

Revised: 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

*In the 2019 General Election, Central Java Province was ranked second in Indonesia with the number of abstention voters (white group/not voting) of 5.52 million people or 19.79% of the total number of voters. This data shows the lack of awareness of the people of Central Java regarding democratic politics. In order to increase political awareness and the quality of democracy in the people of Central Java, the Central Java National and Political Unity Agency (Kesbangpol), as per its mission, has a political education program. This research focuses on the effectiveness of the political education public service program for the people of Central Java by the Central Java Kesbangpol in welcoming the 2024 simultaneous elections. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the political education program that is already running. The method used in this research is a descriptive qualitative method with an inductive approach where researchers collect data through observation, interviews and documentation at the Central Java Kesbangpol Agency Office. The findings of this research show that the political education program organized by the Central Java Kesbangpol is quite effective in its implementation. Based on the results of this research, it can be concluded that the effectiveness of this program is supported by breakthroughs that minimize learning costs, compliance costs and psychological costs.*

**Keywords:** Kesbangpol; Political Education; Public Services

(\*) Corresponding Author: [Felauswatun17@gmail.com](mailto:Felauswatun17@gmail.com)

**How to Cite:** Khasanah, F. U., & Saraswati, A. P. (2024). Efektivitas Program Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah dalam Menyambut Pemilu Serentak 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12747248>.

## PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin dengan tegas demokrasi yang salah satu perwujudannya adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pemilu di Indonesia diselenggarakan sekali dalam 5 tahun dimana



selanjutnya akan diselenggarakan pada tahun 2024. Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat kedua dengan jumlah pemilih golongan putih (golput) terbanyak di Indonesia. Guna menghindari hal serupa dalam pemilu serentak 2024, Kesbangpol Jateng terus memaksimalkan peranannya dalam pelayanan publik berupa pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat Jawa Tengah.

Badan Kesbangpol dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan di bidang politik, maka dari itu Pendidikan Politik merupakan salah satu program Kesbangpol dalam menjalankan fungsinya. Program Pendidikan Politik oleh Kesbangpol Jateng diarahkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehidupan politik demokrasi di Jawa Tengah. Program yang dijalankan melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan dan penguatan peran organisasi masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tomas/toga; program peningkatan potensi politik masyarakat; serta pemantauan dan pendataan partai politik beserta sistem dan implementasinya dalam pemilukada.

Tujuan daripada program Pendidikan Politik oleh Badan Kesbangpol Jawa Tengah ialah guna terselenggaranya peningkatan dan penguatan peran politik bagi masyarakat Jawa Tengah; memberikan pelayanan pendidikan politik bagi seluruh lapisan elemen masyarakat dan wanita di Jawa Tengah. Program Pendidikan politik oleh badan Kesbangpol Jawa Tengah adalah salah satu upaya Kesbangpol Jawa Tengah dalam memberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat Jawa Tengah untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dalam demokrasi NKRI. Badan Kesbangpol Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Indeks demokrasi masyarakat Jawa Tengah yang rendah, peringkat dua dengan jumlah pemilih golput terbanyak di Indonesia pada pemilu serentak 2019 lalu menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis efektivitas program pendidikan politik yang selama ini dijalankan Badan Kesbangpol Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 guna mempersiapkan pemilu serentak 2024.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan peruntukan tertentu. Proses pelaksanaan metode penelitian ini dilakukan secara ilmiah, menandakan bahwa penelitian tersebut dijalankan secara sistematis, rasional, dan empiris. Data yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Penelitian pada umumnya memiliki tujuan yang mencakup aspek pengembangan, pembuktian, penemuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan pihak terkait yang terlibat dalam penelitian tersebut.

Dengan merujuk pada judul penelitian "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Jawa Tengah," yang dapat dikategorikan sebagai judul kualitatif, peneliti akan menerapkan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode ini diharapkan dapat memudahkan pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan situasi lapangan, yang selanjutnya akan

dijelaskan secara rinci dalam laporan akhir penelitian. Oleh karena itu, metode yang akan diterapkan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif.

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan data yang mendukung tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknik pengumpulan data yang efektif, di antaranya adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti akan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (2017: 246-252), yang melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data untuk merangkum dan memilih aspek-aspek yang penting, penyajian data melalui teks naratif, dan verifikasi kesimpulan untuk menegaskan temuan baru yang dihasilkan dari penelitian kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pentingnya pelayanan publik dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap anggota masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah, diharapkan untuk secara aktif berupaya meningkatkan mutu pelayanannya agar dapat memenuhi standar terbaik bagi pengguna layanan. Terutama dalam era saat ini, perbaikan dan peningkatan pelayanan publik menjadi semakin mendesak. Inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak hanya menjadi keinginan, melainkan suatu keharusan yang perlu segera diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Pelayanan yang efektif dalam pemberian pendidikan politik bagi masyarakat Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik dan kualitas demokrasi di wilayah hukum Jawa Tengah. Terdapat berbagai faktor yang dapat menentukan efektivitas pelayanan publik yang selama ini dijalankan Badan Kesbangpol Jawa Tengah antara lain adalah biaya pembelajaran (*learning cost*), biaya kepatuhan (*compliance cost*), biaya psikologis (*psychological cost*) yang dikeluarkan dalam program tersebut guna mencapai tujuannya.

### **a. Faktor biaya pembelajaran (*learning cost*)**

Pengaruh biaya pembelajaran dalam sebuah kebijakan publik dapat menjadi faktor kritis yang mempengaruhi efektivitas dan penerimaan kebijakan tersebut. Biaya pembelajaran mencakup pengeluaran yang dikeluarkan oleh berbagai pihak untuk memahami, mengadaptasi, dan mematuhi kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Stakeholder, baik individu maupun organisasi, seringkali menghadapi beban finansial yang signifikan untuk mengikuti kebijakan baru. Misalnya, pembuat kebijakan perlu mengeluarkan biaya untuk pelatihan atau penyesuaian teknologi agar sesuai dengan standar baru. Begitu pula, masyarakat umum dapat mengalami biaya pendidikan atau penyesuaian pola hidup untuk mematuhi persyaratan kebijakan.

Pentingnya pemahaman dan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan seringkali terkait dengan tingkat biaya pembelajaran. Semakin tinggi biaya tersebut, semakin sulit bagi pihak terkait untuk sepenuhnya mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam beberapa kasus, biaya pembelajaran yang tinggi dapat menyebabkan resistensi atau

penolakan terhadap kebijakan, terutama jika terdapat ketidaksetujuan terhadap manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biayanya. Keputusan pembuat kebijakan juga dipengaruhi oleh biaya pembelajaran. Mereka perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kompleksitas kebijakan dan biaya pembelajaran yang mungkin timbul dari pihak yang terkena dampak. Kebijakan yang terlalu rumit atau memerlukan biaya pembelajaran yang tidak terjangkau dapat mengurangi penerimaan dan keberhasilan kebijakan tersebut. Dampak ekonomi juga merupakan aspek penting dari biaya pembelajaran dalam kebijakan publik. Dalam situasi di mana individu atau organisasi harus mengalihkan sumber daya dari kegiatan produktif untuk menanggapi kebijakan, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Usaha kecil, masyarakat terpinggirkan, atau kelompok rentan seringkali lebih sulit menanggung beban ekonomi tambahan akibat biaya pembelajaran.

Untuk mengatasi pengaruh negatif biaya pembelajaran, kebijakan sebaiknya dirancang dengan panduan yang jelas, sederhana, dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Selain itu, upaya mitigasi dapat melibatkan penyediaan sumber daya edukatif yang mudah diakses, serta perencanaan implementasi bertahap untuk meredakan beban finansial pada tahap awal. Dengan memahami dan mengelola biaya pembelajaran, pembuat kebijakan dapat meningkatkan penerimaan, kepatuhan, dan keberhasilan kebijakan publik mereka, sambil meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul akibat beban finansial yang ditimbulkan.

Dalam menghadapi tantangan biaya pembelajaran dalam pelaksanaan program pendidikan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah telah menjalankan inisiatif kolaboratif dengan organisasi masyarakat dan LSM di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kemitraan positif antara Kesbangpol dan masyarakat umum memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan minat kaum muda terhadap dunia politik di Jawa Tengah.

Badan Kesbangpol Jawa Tengah menjalankan kerjasama secara merata dengan organisasi masyarakat (Ormas) di seluruh kabupaten, termasuk Kabupaten Boyolali, Tegal, Banyumas, dan Semarang, melalui pelaksanaan program rebug pemuda. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya mengurangi beban biaya pembelajaran di kalangan pemuda tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik yang disalurkan melalui mitra lokal untuk mencapai dampak yang lebih luas di masyarakat.

Selain itu, Badan Kesbangpol Jawa Tengah juga berkomitmen memberikan layanan pendidikan politik melalui konten-konten edukatif di media sosial. Mengantisipasi Pemilihan Umum 2024, di mana mayoritas pemilih adalah kaum muda yang cenderung lebih akrab dengan teknologi, Kesbangpol Jawa Tengah memanfaatkan momen ini dengan menyajikan konten-konten mendidik. Dengan strategi ini, badan Kesbangpol berusaha untuk membangunkan kesadaran politik dan demokrasi di kalangan masyarakat Jawa Tengah.

Sebagai langkah proaktif, Badan Kesbangpol Jawa Tengah telah menyediakan konten edukatif di akun Instagram dan kanal YouTube resminya. Melalui platform ini, masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi pendidikan politik secara gratis. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban biaya pembelajaran tetapi juga menciptakan akses pendidikan politik yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah.

b. Biaya kepatuhan (compliance cost)

Beban biaya kepatuhan, sering kali terabaikan dalam diskusi kebijakan publik, memainkan peran penting dalam membentuk kerangka regulasi. Biaya ini mencakup beban finansial dan operasional yang harus ditanggung oleh individu, bisnis, dan organisasi untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Beban biaya kepatuhan mencakup berbagai pengeluaran yang dikeluarkan oleh entitas yang berusaha menyesuaikan praktik mereka dengan ketentuan kebijakan publik. Biaya ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk biaya untuk konsultasi hukum, program pelatihan, peningkatan teknologi, dan penyesuaian prosedur. Baik dalam konteks regulasi lingkungan, pajak, atau hukum ketenagakerjaan, beban biaya kepatuhan melintasi sektor, mempengaruhi individu, usaha kecil, dan perusahaan besar.

Konsekuensi ekonomi dari beban biaya kepatuhan sangat rumit dan mendalam. Bagi sebuah organisasi beban finansial untuk memenuhi persyaratan regulasi dapat menghambat pertumbuhan, inovasi, dan daya saing. Pengalihan sumber daya dari kegiatan produktif ke upaya kepatuhan dapat menghambat perkembangan ekonomi, terutama di sektor dengan beban regulasi tinggi. Menemukan keseimbangan antara tujuan regulasi dan meminimalkan konsekuensi ekonomi yang merugikan menjadi tugas yang rumit bagi para pembuat kebijakan.

Keberhasilan kebijakan publik bergantung pada implementasinya yang efektif, dan beban biaya kepatuhan menjadi faktor kritis dalam menentukan kesuksesan tersebut. Regulasi yang berlebihan atau tidak jelas dapat menyebabkan biaya kepatuhan yang tinggi, memicu resistensi, ketidakpatuhan, atau konsekuensi yang tidak diinginkan. Para pembuat kebijakan harus dengan hati-hati mengkalibrasi tingkat ketentuan dalam kebijakan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa memberikan beban yang berlebihan pada pemangku kepentingan. Untuk meringankan beban biaya kepatuhan, para pembuat kebijakan dapat mengadopsi beberapa strategi. Regulasi yang jelas, ringkas, dan mudah diakses dapat meminimalkan kebingungan dan mengurangi kebutuhan akan upaya kepatuhan yang ekstensif. Selain itu, para pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan untuk menyediakan sumber daya edukatif, panduan, dan dukungan kepada pihak yang terkena dampak, terutama entitas yang lebih kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menavigasi lanskap regulasi yang kompleks.

Badan Kesbangpol Jawa Tengah dalam menangani beban biaya kepatuhan memiliki cara tersendiri seperti memanfaatkan teknologi di era

di era digital ini. Mengingat hampir separuh dari jumlah pemilih dalam pemilu serentak 2024 di Jawa Tengah adalah kaum milenial, penggunaan teknologi dalam operasional sangatlah meminimalisir beban biaya kepatuhan. Segala kebijakan yang dapat diakses by system termasuk dalam program pendidikan politiknya dimana dalam bermitra dengan Ormas setempat. Sistem pelayanan birokrasi yang paperless di Badan Kesbangpol Jawa Tengah memudahkan masyarakat setempat untuk mengakses kebijakan-kebijakan yang dibuat. Badan Kesbangpol Jawa Tengah memiliki one for all website yang mencakup seluruh pelayanannya. Sistem one website dirasa cukup guna menghemat biaya kepatuhan dan meningkatkan keefektifitasan program pelayanan.

c. Beban biaya psikologis (psychological cost)

Beban biaya psikologis juga perlu di pertimbangkan dalam operasional kebijakan publik. Biaya psikologis mencakup efek emosional, mental, dan sosial yang muncul sebagai respons terhadap pelaksanaan kebijakan tertentu. Hal ini mencakup stres, kecemasan, ketidakpastian, atau bahkan dampak pada hubungan antarindividu. Biaya psikologis ini sering kali terjadi tanpa disadari dan dapat membentuk persepsi, sikap, dan tingkah laku yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas dan penerimaan kebijakan.

Beban psikologis pada masyarakat umum dapat berupa kebingungan atau ketidakpastian terkait implikasi kebijakan baru. Kesenjangan informasi atau komunikasi yang tidak memadai dapat memicu kecemasan dan ketidakpercayaan. Badan Kesbangpol Jawa Tengah mengantisipasi beban biaya psikologis dalam program pendidikan politik berupa kanal aduan yang secara langsung terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah (lapor gub). dengan adanya kanal komunikasi yang diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, masyarakat diharapkan tidak merasa terbebani dan melapor apabila ada keraguan ataupun kecemasan.

Citra politik yang tergolong buruk bagi masyarakat Jawa Tengah menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Kesbangpol Jawa Tengah dimana banyak masyarakat Jawa Tengah yang menolak untuk terlibat dalam situasi politik, termasuk penyuluhan pendidikan politik dari Kesbangpol. Maka dari itu, upaya-upaya seperti penyebaran konten positif, deklarasi pemilu damai, jambore kesbangpol, dan kegiatan positif lainnya diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat akan sistem politik di Jawa Tengah. Deteksi diri akan berita hoax juga merupakan bagian dari upaya Badan Kesbangpol Jawa Tengah guna membangun kepercayaan masyarakat akan pentingnya Pendidikan Politik.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat Jawa Tengah memiliki minat yang minim akan politik demokrasi di Indonesia, dibuktikan dengan tingginya angka golput (golongan putih) dalam Pemilihan Umum serentak 2019 lalu. Guna mengantisipasi hal tersebut dalam Pemilihan Umum serentak di tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (ODP) yang bertanggung jawab akan kehidupan berbangsa dan berpolitik di Jawa Tengah memiliki sebuah kebijakan Pendidikan Politik bagi masyarakat Jawa Tengah guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan politik demokrasi di Indonesia.

Dalam menentukan efektivitas suatu program kebijakan publik, faktor yang perlu diperhatikan antara lain beban biaya pembelajaran (learning cost), biaya kepatuhan (compliance cost), dan biaya psikologis (psychological cost) yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Badan Kesbangpol Jawa Tengah memiliki cara tersendiri dalam menangani beban biaya pembelajaran, biaya kepatuhan, dan biaya psikologis.

Dalam meminimalisir beban biaya pembelajaran, Badan Kesbangpol Jawa Tengah bekerja sama dengan organisasi masyarakat di Jawa Tengah secara langsung yang dimana akan dilanjutkan dan disampaikan kepada masyarakat luas. Badan Kesbangpol Jawa Tengah juga meminimalisir beban biaya kepatuhan dengan pemanfaatan teknologi. Segala keperluan yang sekarang dapat diakses melalui website (by sistem) mempermudah Badan Kesbangpol dalam menjalankan program pendidikan Politiknya. Badan Kesbangpol Jawa Tengah juga berupaya mengantisipasi dan mendeteksi diri akan berita-berita hoax mengenai politik yang beredar di sosial media dan penyuluhan kegiatan-kegiatan positif juga konten-konten positif guna menangani beban biaya psikologis yang diterima masyarakat Jawa Tengah akan program Pendidikan Politik ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Efriza dan Indrawan, Jerry. 2018. *Komunikasi Politik*, Malang: Cita Intrans Selaras
- Faturrahman. dkk. 2012. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik*, Bandung: Mandar Maju
- Narwoko, Dwi, J. dan Suyanto, Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.*, Jakarta :Kencana
- Ndraha, T. 2011. *Ilmu Pemerintahan Baru (Kybernologi)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nazir, M. 2013. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Rauf, R. (2017). *Hakekat Organisasi Perangkat Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis)*.  
Wedana: *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(2), 345-350.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik Empirik- Inovatif*, Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada